

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zinal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press Yogyakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta.

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Azwar, Syaifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budiono, Herlien, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hamid, Sanusi dan Ismail Suardi Wekke. 2021. *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.

Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang.

HS, H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Semiawan, Conny R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Radja Grafindo, Persada, Jakarta.

_____, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Andrian, 2013, *Pasar Modal Mengenai Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyono, R, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjokusumo, Iskandar dan Soemardji Ansori, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang ilmu-ilmu sosial Humaniora*, Unesa University Press, Surabaya.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia. Bogor.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 110.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi.

C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Adriawan, Dian, “Pengaturan Kejahatan *Money Laundering* (Pencucian Uang Di Beberapa Negara)”, *Jurnal hukum Prioris*, Volume.1, Nomor.1, 2006.

Elisabeth, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2019.

Elvina, Mia, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Lex Renaissance*, No.2, Vol.5, 2020.

Handayani, Kristanti, “Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2017.

Ismayawati, Any, 2011, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, No.1, 2011.

Rahman, Fikri Ariesta, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Penghadap, *Lex Renaissance*, No.2, Vol.3, 2018.

Risqullah, Ananda Muhammad, “Peran Notaris Cegah Transaksi Illegal Melalui GoAML”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10, No. 16, 2022.

Riyaldi, Made, dkk, “Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Sari, Mudiana Permata, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Ntaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2019.

Tan, Hadiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Sehubungan Dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2019.

D. Internet

Bank Indonesia, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>, diakses tanggal 13 November 2021.

Bangun Santoso dan Ria Rizki Nirmala Sari, “Diluncurkan Awal 2022, PPATK Terima 240 juta Laporan Soal Keuangan Melalui GoAML”, *Suara.com*,
<https://www.suara.com/news/2022/04/18/125253/diluncurkan-awal-2022-ppatk-terima-240-juta-laporan-soal-keuangan-melalui-goaml>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, “Kompilasi Undang-Undang Tentang Ratifikasi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang”,
https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1475201125_.pdf, diakses tanggal 13 November 2021.

Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM, “Pengumuman Bersama Kementerian Hukum Dan HAM”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2882-pengumuman-bersama-kementerian-hukum-dan-ham>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

Koran Jakarta, “PPATK Digitalisasi Layanan Pelaporan Antipencucian Uang”
<https://koran-jakarta.com/ppatk-digitalisasi-layanan-pelaporan-antipencucian-uang>, diakses tanggal 16 November 2021.

Publikasi PPATK, “Tugas dan Fungsi PPATK”,
<https://ppid.ppatk.go.id/?p=590>, diakses tanggal 15 November 2021.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “Organisasi Internasional”, https://www.ppatk.go.id/luar_negeri.html, diakses tanggal 23 November 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019”, Tim Riset dan Pengembangan, Jakarta, Indonesia, hlm. 3-4, https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/1615872606__compressed-dikompresi-1.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

PPATK, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017”, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf, diakses pada tanggal 19 Juni 2022.

Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON) http://siemon.kemenkumham.go.id/cari_notaris/, diakses tanggal 13 Januari 2022.